



Kertas Kebijakan

**Pengembangan Usaha Kakao
di Kabupaten Majene,
Provinsi Sulawesi Barat**



KPP@D



FORDFOUNDATION



FORD FOUNDATION

KERTAS KEBIJAKAN

Pengembangan Usaha Kakao di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

KERJASAMA ANTARA:

KPPOD dan Pemerintah Kabupaten Majene
didukung oleh
FORD FOUNDATION

Jakarta 2013

Disusun oleh:

Tim RIA Kabupaten Majene

Difasilitasi oleh

Boedi Rheza
Elizabeth Karlinda

2013



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	ii
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	1
2.1. Masalah yang Sering Dihadapi Petani Kakao Majene	1
2.2. Masalah Utama (Akar Masalah)	2
2.3. Pengaruh Terhadap Petani Kakao	3
III. Tujuan Kebijakan	3
IV. Alternatif Kebijakan	4
V. Analisis Biaya dan Manfaat	6
A. Alternatif Pertama: <i>Do Nothing</i>	7
B. Alternatif Kedua: Revisi Perda SOTK Majene untuk Memisahkan Kelembagaan yang Menaungi Penyuluh Pertanian dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	8
C. Alternatif Ketiga: Membentuk Perda Tentang Kelembagaan Kelompok Tani sebagai Pelaksanaan dari Permentan No.82/2013 dan UU No.16/2006	9
D. Alternatif Keempat: Program Peningkatan Kapasitas Penyuluh Melalui Pelatihan	9
VI. Konsultasi Publik	10
VII. Strategi Implementasi	10

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.	Pohon Masalah Pengembangan Kakao di Majene	2
Gambar 2.	Externalitas Positif Perda Kelompok Tani	10
Tabel 1.	Perumusan Masalah Pengembangan Kakao Majene	3
Tabel 2.	Ringkasan Tujuan Kebijakan	5
Tabel 3.	Skor Indeks Manfaat dan Biaya	7
Tabel 4.	Ringkasan Biaya dan Manfaat	7
Tabel 5.	Identifikasi Stakeholder yang Terlibat dalam Pembentukan Perda Kelompok Tani	11
Tabel 6.	Ringkasan Strategi Implementasi	12

I. LATAR BELAKANG

Salah satu pendekatan pembangunan pertanian adalah melalui kegiatan agribisnis yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan pengembangan usaha ekonomi rakyat yang berkelanjutan, yang dilakukan dalam kerangka otonomi untuk memperkuat perekonomian daerah. Pengembangan sektor pertanian melibatkan berbagai aspek rantai nilai, baik pada tahap bercocok tanam, pengumpulan, pengolahan maupun pemasaran (distribusi). Oleh karena itu, agar produk pertanian yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek rantai nilai dari usaha tersebut.

Salah satu produk pertanian yang cukup strategis adalah tanaman kakao (*Theobroma cacao L.*). Kakao merupakan komoditas strategis minimalnya karena dua hal. *Pertama*, Indonesia merupakan produsen kakao nomor dua di dunia setelah Pantai Gading, dengan produksi 809.586 ton pada tahun 2012 (Direktorat Jenderal Perkebunan). Dengan produksi sebesar tersebut, komoditas ini telah menyumbang devisa sebesar US \$ 1,1 Milyar pada tahun 2012 yang merupakan perolehan devisa ketiga terbesar setelah kelapa sawit dan karet (Kementerian Perdagangan, 2013). *Kedua*, kegiatan usaha ini 95% melibatkan petani kecil dengan tingkat kepemilikan lahan 0,5-2 ha. Dengan demikian, perkembangan usaha kakao secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ekonomi kerakyatan. Dari keseluruhan total produksi kakao Indonesia, kontribusi terbesar (60%) berasal empat propinsi di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Khusus di Sulawesi Barat, perkebunan kakao terdapat di seluruh daerah, salah satunya Kab. Majene. Di Majene, mayoritas penduduknya berusaha kakao sebagai mata pencaharian utama, selain ada mata pencaharian sampingan seperti menjadi nelayan atau usaha tanaman pangan. Jumlah petani kakao di Majene sebanyak 10.289 KK (Dinas Kehutanan dan Perkebunan – Dishutbun 2012). Jika diasumsikan setiap keluarga memiliki empat anggota (bapak, ibu dan dua anak), maka total jumlah petani yang ada sekitar 40.000 petani. Namun demikian usaha perkebunan kakao di Majene masih dalam skala usaha pertanian tradisional. Rata-rata kepemilikan lahan kakao oleh para petani hanya sebesar 1 Ha. Total lahan yang digunakan untuk budidaya kakao hingga tahun 2012 mencapai 12.412 Ha. Jika dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian daerah, subsektor perkebunan ini (utamanya kakao) menyumbang kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Majene yakni 20% terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Maju tidaknya usaha kakao ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) petani, teknologi, akses lahan, dll. Namun, berdasarkan hasil *need assessment* yang telah dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) perihal rantai nilai usaha kakao di Majene, para petani Majene tidak memiliki posisi tawar terutama dalam sistem pemasaran serta tidak memiliki modal yang memadai untuk melaksanakan usaha kebun. Justru peranan pengepul masih lebih menonjol ketimbang petani kakao di dalam rantai perdagangan kakao. Kondisi ini diperberat dengan kelembagaan petani yang lemah. Kelompok tani (poktan) yang seyogyanya dibentuk oleh para petani sebagai tempat belajar, bekerja sama dan unit produksi, justru dibentuk untuk kepentingan golongan tertentu. Akibatnya, petani hanya sebagai penerima harga (*price taker*) dan akhirnya pendapatan serta kesejahteraan petani pun rendah.

Peningkatan kapasitas petani sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha kakao di Majene. Dengan kapasitas yang tinggi, produktivitas kakao dan posisi tawar petani meningkat. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat Majene secara umum. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas petani, KPPOD melakukan kegiatan penguatan kapasitas legislasi yang bertujuan menyusun kebijakan pengembangan komoditas kakao di Majene khususnya pada aspek SDM petani yang dilakukan pada tanggal 12-14 September di Majene, dengan mengundang para *stakeholder* kakao di Majene. Dari kegiatan tersebut, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas kakao Majene terutama pada aspek kapasitas petani digali lebih mendalam untuk dapat mencari solusi berupa pilihan kebijakan dan upaya pemecahan atas permasalahan tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

2.1. MASALAH YANG SERING DIHADAPI PETANI KAKAO MAJENE.

Dari hasil konsultasi yang melibatkan para *stakeholder*, terdapat beberapa masalah yang masih dihadapi oleh petani Kabupaten Majene yaitu sebagai berikut:

a. Serangan hama dan penyakit

Serangan hama dan penyakit masih sering menyerang budidaya kakao di Majene. Beberapa jenis hama yang sering menyerang budidaya kakao adalah Penggerek Buah Kakao (PBK), helopelkis, penggerek batang. Tidak hanya itu, penyakit pada kakao pun masih menjadi masalah dalam budidaya kakao. Penyakit kakao yang

sering menyerang adalah busuk buah, PSD, kanker batang dan jamur upas. Luas lahan yang terserang hama dan penyakit ini sangat tinggi yakni 8786,2 Ha atau 71% dari total lahan kakao di Majene (Dishutbun Kabupaten Majene, 2011).

b. Sarana produksi masih kurang

Hingga saat ini, sarana produksi khususnya pupuk masih menjadi kendala dalam pelaksanaan budidaya kakao di Majene. Pupuk masih sulit tersedia di daerah sentra kakao utamanya yang berlokasi di daerah pegunungan. Hal ini dikarenakan sulitnya akses transportasi yang berdampak pada terhambatnya distribusi saprodi ke daerah pegunungan. Di lain sisi, kemampuan petani untuk membeli pupuk pun masih rendah. Bahkan, tidak sedikit petani yang belum memiliki kesadaran untuk membeli pupuk dan pestisida. Mereka hanya mengandalkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah.

c. Motivasi petani merawat kebun rendah

Motivasi petani dalam merawat kebun juga masih rendah. Hal ini mengakibatkan kebun kakao tidak terawat dan berdampak pada kurang optimalnya produktivitas kebun kakao. Petani merasa bahwa hasil yang didapatkan dirasa tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Mereka juga tidak memiliki analisa usaha tani secara finansial. Akibatnya, petani tidak fokus dalam usaha budidaya kakao dan malas untuk merawat kebun.

d. Pemasaran kakao bersifat individu

Pemasaran bersama masih jarang dilakukan

oleh para petani. Mereka melakukan pemasaran secara individu yang dijual langsung ke pedagang pengepul. Akibatnya posisi tawar petani kakao rendah dan harga yang diterima petani rendah.

e. Kurangnya modal usaha bertani kakao

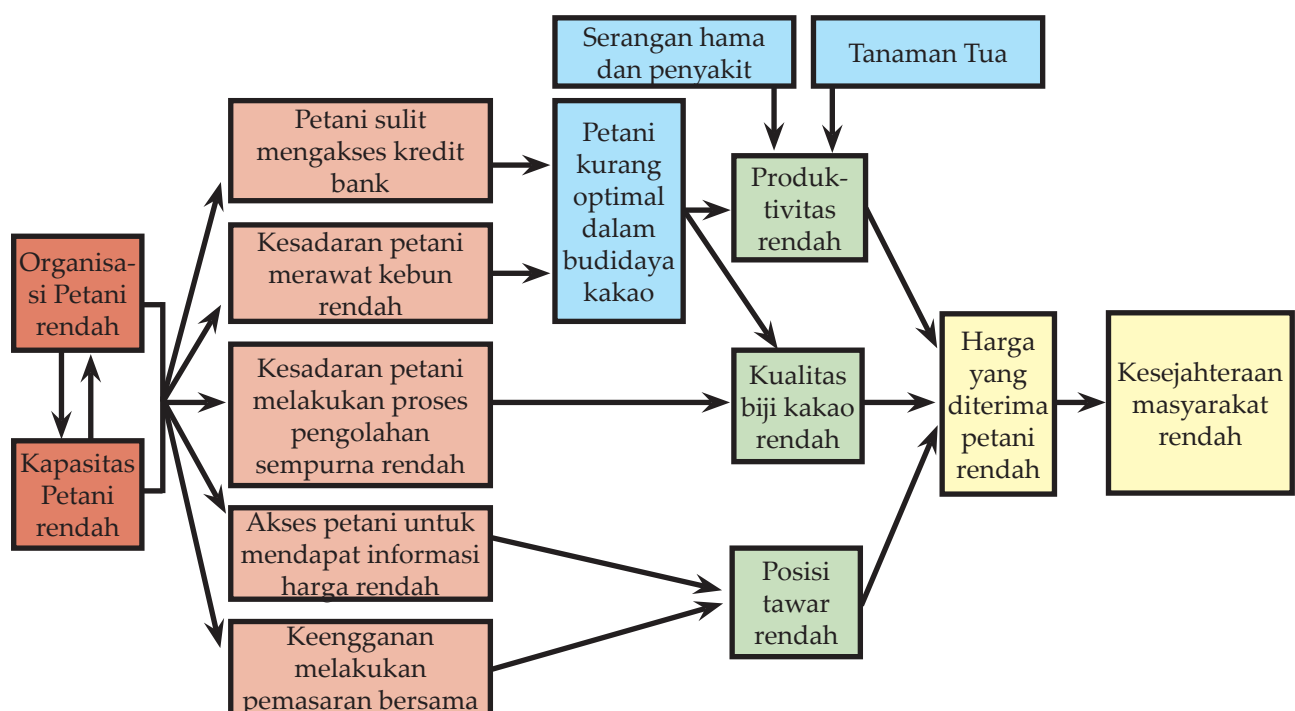
Pendapatan petani kakao saat ini kurang dari Rp 1,5 juta per bulannya. Rendahnya pendapatan petani tersebut mengakibatkan petani hanya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak memiliki modal untuk berusaha kakao, terutama untuk melakukan perawatan kebun dan menyediakan saprodi.

Dalam Gambar 1 dibawah dapat dilihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kakao di Kabupaten Majene, termasuk hubungan sebab-akibat dari masing-masing permasalahan tersebut.

2.2. MASALAH UTAMA (AKAR MASALAH)

Dari hasil diskusi para *stakeholders* dan tim perumus, akar masalah dalam usaha kakao di Kabupaten Majene adalah **rendahnya kapasitas petani dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap maupun permodalan**. Setelah diidentifikasi lebih mendalam, pihak yang berpengaruh terhadap akar masalah ini adalah Penyuluh, Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD), Pemerintah Daerah, Perbankan, Kelompok Tani dan dari pihak Swasta. Perilaku dari masing-masing pihak yang mempengaruhi akar masalah tersebut dapat terlihat pada Tabel 1 disamping.

Gambar 1. Pohon Masalah Pengembangan Kakao di Majene



2.3. PENGARUH TERHADAP PETANI KAKAO

Rendahnya kualitas SDM petani mengakibatkan petani tidak mampu mengatasi masalah usaha taninya: petani tidak merawat kebun kakao dengan baik dan petani tidak melakukan proses pra dan pasca panen dengan baik. Pada akhirnya, hal tersebut berpengaruh pada:

a. Rendahnya produktivitas

Produktivitas kakao di Majene masih tergolong rendah. Pada tahun 2011, produktivitas kakao sebesar 880 kg/ha/tahun meningkat 7,9 % di tahun 2013 menjadi sebesar 950 kg/ha/tahun. Angka ini masih jauh dari produktivitas optimal kakao di Majene yang sebesar 3.000 kg/ha/tahun (Bappeda Kab. Majene).

b. Rendahnya pendapatan dan kesejahteraan para petani

Hingga kini, pendapatan petani kakao masih

rendah, yakni kurang dari Rp 1.500.000 per bulannya. Rendahnya pendapatan dari berkebun kakao menyebabkan mereka tidak dapat menambah modal untuk melakukan usaha tani kakao.

III. TUJUAN KEBIJAKAN

Untuk memecahkan akar masalah di sektor kakao Majene, maka diperlukan suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap maupun modal. Untuk mencapai tujuan tersebut, diidentifikasi bahwa pelaku utama yang menjadi objek kebijakan adalah petani dan penyuluh. Dua aktor inilah yang memiliki peran penting agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. Adapun perilaku yang diinginkan dan faktor pendorong serta penghambat tercapainya tujuan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di halaman selanjutnya, tentang ringkasan tujuan kebijakan.

Tabel 1. Perumusan Masalah Pengembangan Kakao Majene

PERUMUSAN MASALAH				
Indentifikasi Akar Masalah:	Penyebab	Pihak/Perilaku/Motivasi yang Berpengaruh		
		Aktor yang Terlibat	Perilaku Menyumbang	Motivasi
Rendahnya kapasitas petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pelatihan 2. Kinerja penyuluh kurang optimal 3. Kelembagaan petani lemah 4. Petani kesulitan mengakses kredit perbankan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluh 2. Tim Penyusun Anggaran Daerah 3. Pemda 4. Perusahaan 5. LSM 6. Asosiasi 7. Kelompok tani 8. Perbankan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penyuluh terbatas. Masih ada penyuluh menangani lebih dari satu desa. 2. Kapasitas dan pengetahuan penyuluh terbatas. Latar belakang penyuluh yang berbeda-beda sehingga tidak semua penyuluh memahami teknik budidaya kakao. 3. Status penyuluh yang merupakan tenaga kontrak non PNS (tidak tetap) dan tidak mendapatkan dana operasional penyuluh. 4. Sistem kenaikan pangkat tenaga penyuluh yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. 5. Fenomena yang seringkali muncul pada tenaga penyuluh PNS adalah penyuluh yang sudah berstatus PNS berpindah menjadi tenaga struktural (non penyuluh). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan yang dilakukan oleh PPL disesuaikan dengan keterbatasan dari sisi jumlah dan kapasitas PPL, serta sifat PPL yang polivalen/ umum dan ketersediaan anggaran. 2. Desain kelembagaan Lembaga Penyuluhan bergabung dengan Ketahanan Pangan menyebabkan kurang leluasa untuk untuk menyusun program dan alokasi anggaran. 3. Kewajiban perbankan untuk menjaga performa perbankan dengan meminimalisir kredit macet yang sering berasal dari petani, sehingga menerapkan persyaratan berbelit-belit.

Lanjutan Tabel 1.				
Identifikasi Akar Masalah:	Penyebab	Pihak/Perilaku/Motivasi yang Berpengaruh		
		Aktor yang Terlibat	Perilaku Menyumbang	Motivasi
			<p>6. TPAD tidak memprioritaskan program pengembangan kakao di Majene khususnya di bidang penyuluhan sehingga anggaran pelatihan bagi petani sangat minim.</p> <p>7. Desain kelembagaan penyuluhan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bersama dengan Ketahanan Pangan. Hal ini tidak sesuai dengan nomenklatur dalam UU No.16 Tahun 2006 yang menghendaki lembaga penyuluhan berdiri sendiri. Implikasinya, kinerja lembaga penyuluhan tidak optimal.</p> <p>8. Banyak poktan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik yakni sebagai tempat belajar, tempat bekerja sama dan unit produksi.</p> <p>9. Rumitnya administrasi dan persyaratan dalam mengakses kredit perbankan dan dana revitalisasi. Persyaratan yang diberikan pihak bank lebih rumit dibandingkan dengan syarat yang telah ditentukan pusat berdasarkan pedoman pelaksanaan dana revitalisasi</p> <p>10. Minimnya tenaga penyuluh swasta yang berasal dari perusahaan/asosiasi/LSM yang memberikan pendampingan ke petani di Majene.</p>	<p>4. Banyak poktan yang dibentuk untuk kepentingan pribadi/politik, bukan karena kepentingan petani yang sesungguhnya (bottom up).</p> <p>5. Perusahaan/asosiasi menempatkan banyak penyuluh swasta ke daerah sentra kakao yang mampu memberikan pasokan kakao dalam jumlah yang besar.</p>

IV. ALTERNATIF KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan kebijakan yang disebutkan di atas, dilakukan identifikasi terhadap alternatif-alternatif intervensi yang mungkin dilakukan. Alternatif ini dapat berupa regulasi maupun non regulasi. Alternatif non regulasi yang teridentifikasi adalah peningkatan alokasi anggaran untuk pelatihan

penyuluh, penguatan kelembagaan KPPK, koordinasi antar SKPD untuk program-program peningkatan kapasitas petani, pemberian bantuan modal melalui KTNA, adanya distributor pupuk ditingkat kecamatan, meningkatkan kuantitas penyuluh dan perbaikan sistem rekrutmen penyuluh, registrasi kelompok tani yang sudah ada dan memperluas jangkauan penyuluh swasta.

Tabel 2. Ringkasan Tujuan Kebijakan

TUJUAN KEBIJAKAN Meningkatkan Kapasitas Petani (Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan dan Modal)	
1. Pelaku dan perilaku yang diinginkan	<p><u>Petani</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Merawat kebun sesuai dengan anjuran teknis budidaya kakao yang baik • Melaksanakan penguatan fungsi organisasi kelompok tani • Melakukan pemasaran bersama dengan petani lain melalui poktan/UPH • Membuka akses kemitraan dengan pihak lain (swasta, perusahaan, LSM, perbankan) • Melakukan akses informasi atau komunikasi (pemda, perbankan) • Kemandirian permodalan (tidak bergantung pada tengkulak, pedagang pengepul) <p><u>Penyuluh</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan penyuluhan secara intensif • Pengetahuan teknis kakao penyuluh memadai
2. Pihak dan faktor yang mendorong & menghambat	
a) pihak yang dapat membantu	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Teknis Pertanian • Penyuluh pertanian • LSM • Perbankan • Tokoh masyarakat • DPRD • Perusahaan/Asosiasi
b) pihak yang dapat menghambat	<ul style="list-style-type: none"> • Tengkulak
c) faktor yang mendorong	<ul style="list-style-type: none"> • Keinginan meningkatkan produktivitas kakao di Kab. Majene. • Keinginan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani Majene.
d) faktor yang menghambat	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya alih fungsi lahan (kebun kakao menjadi rumah) • Terjadinya alih profesi (dari petani kakao menjadi nelayan, pedagang dan lainnya) • Infrastruktur (jalan) belum memadai • Penurunan regenerasi petani kakao

Sementara itu, alternatif kebijakan yang bersifat regulasi adalah merevisi perda SOTK untuk membentuk Badan pelaksana penyuluhan pertanian dan peternakan sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam UU No.16 tahun 2006, yang akan memperkuat kelembagaan penyuluh. Alternatif lainnya adalah membentuk perda tentang kelembagaan kelompok tani, yang akan menjadi landasan hukum bagi penguatan kelembagaan petani, dan membuat SK tentang distribusi pupuk.

Dari keseluruhan alternatif tersebut, kemudian dilakukan screening terhadap alternatif-alternatif yang relevan dan untuk di analisis lebih lanjut. Alternatif-alternatif yang relevan tersebut adalah:

1. *Do Nothing* (Membiarkan kondisi yang ada)

Pada opsi ini, pemda tidak melakukan apapun untuk memperbaiki kondisi yang saat ini terjadi pada usaha kakao di Kab. Majene. Apabila kondisi ini dibiarkan, kapasitas petani tidak meningkat,

bahkan bisa menurun. Dengan demikian, usaha perkebunan kakao di Majene tidak akan berkembang, produktivitas kakao menurun dan pendapatan petani menurun. Pada akhirnya, dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat Majene.

2. Revisi Perda SOTK Mejene untuk membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang sesuai dengan nomenklatur yang dikehendaki dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pada alternatif ini dilakukan revisi perda SOTK Kab. Majene untuk memisahkan kelembagaan yang menaungi penyuluh perkebunan dari Badan Ketahanan Pangan. Lembaga penyuluhan yang ada saat ini adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dimana bentuk lembaga tersebut tidak sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU

No.16 Tahun 2006. Pada perundangan tersebut, menghendaki lembaga penyuluhan berdiri sendiri, tanpa melekat dengan lembaga lain, yakni dengan bentuk Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dengan terpisahnya lembaga penyuluhan dengan ketahanan pangan, lembaga penyuluhan tersebut mendapatkan anggaran lebih dari APBN yang dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan pelatihan ke petani serta membiayai fasilitas dan operasional penyuluh. Meningkatnya pelatihan ke petani dan kinerja penyuluh tersebut dapat meningkatkan kapasitas petani.

3. Membentuk Perda tentang kelembagaan kelompok tani sebagai pelaksanaan dari permentan No.273/KPTS/2009 dan UU No.16 Tahun 2006.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petani (Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap) dapat dilakukan dengan memberdayakan kelompok tani sebagai salah satu 'rumah' petani. Hingga tahun 2012, terdapat 1.018 kelompok tani (poktan) di Majene. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 10% atau sekitar 100 poktan yang dapat menerapkan fungsi kelompok tani dengan baik yakni tempat belajar, tempat bekerjasama dan unit produksi. Dengan adanya perda ini, diharapkan ada penertiban dan registrasi ulang bagi kelompok tani untuk meminimalisir kelompok tani 'merpati' sehingga kelompok tani yang ada dapat berfungsi secara optimal dan dapat memberdayakan petani. Selain itu, Perda ini juga bertujuan untuk memperkuat posisi kelompok petani dan juga mengidentifikasi kelompok tani yang masih aktif maupun tidak di Majene. Pada akhirnya hal tersebut dapat meningkatkan kapasitas petani di Majene.

4. Program peningkatan kapasitas penyuluh

Hingga kini, kapasitas dan kualitas penyuluh masih kurang memadai, khususnya dalam teknis budidaya kakao. Oleh karena itu, perlu dilakukan program-program peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan. Beberapa kegiatan atau program yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas dan jumlah penyuluh, diantaranya seperti:

- Penguatan kapasitas optimalisasi penyuluh yang ada secara fungsional di semua tingkatan pemerintahan;
- Meningkatkan koordinasi Dishutbun dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- Training of Trainer (TOT) dan sekolah lapang bagi penyuluh dan penambahan jumlah PPL minimal 1 orang satu desa;
- Pelatihan teknis budidaya kakao;
- Optimalisasi peran penyuluh swadaya di masing-masing desa.

Penyuluh merupakan pihak yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas dan kualitas SDM petani. Dengan demikian, meningkatnya kapasitas penyuluh dari program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petani.

V. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA

Untuk menentukan kebijakan yang diambil, dilakukan analisis biaya dan manfaat terhadap masing-masing alternatif kebijakan. Analisis manfaat dilakukan untuk melihat dampak baik dari masing-masing alternative kebijakan. Analisis biaya dilakukan untuk melihat beban bagi para stakeholder dari masing-masing alternative kebijakan. Tahapan ini merupakan tahapan terpenting karena hasil analisisnya akan dijadikan dasar utama pengambilan keputusan mengenai alternatif kebijakan mana yang akan dipilih. Selain itu, analisis biaya manfaat ini juga berguna sebagai alat untuk mengklarifikasi apakah identifikasi masalah dan tujuan penerapan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya sudah tepat.

Pola manfaat dan biaya yang terjadi pada empat opsi tindakan tersebut di atas relatif seragam dan konsisten setiap tahun, maka analisis manfaat dan biaya dilakukan dengan menghitung manfaat dan biaya tahunan (rata-rata). Dalam analisis seperti ini, proses RIA tidak perlu dilakukan diskonto untuk mendapatkan nilai sekarang (*present value*). Opsi yang terbaik adalah yang menghasilkan manfaat/biaya tahunan (rata-rata) yang positif.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan tujuan yang akan dicapai, berikut analisis manfaat dan biaya yang dilakukan pada masing-masing alternatif tindakan yang dipilih.

- **Alternatif Pertama: Do Nothing**
- **Alternatif Kedua: Revisi Perda SOTK Mejene untuk membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**
- **Alternatif Ketiga: Membentuk Perda tentang kelembagaan kelompok tani**
- **Alternatif Keempat: Program peningkatan kapasitas penyuluh**

Untuk memilih alternatif tindakan yang terbaik dilakukan analisis manfaat dan biaya. Langkah pertama yang dalam analisis biaya dan manfaat adalah menentukan indikator manfaat atau biaya yang diterima oleh masing-masing *stakeholder* apabila masing-masing alternatif tindakan dilakukan. Besarnya manfaat atau biaya ditunjukkan/diukur dengan indeks skor dengan skala -3 sampai dengan 3. Dimana angka positif menunjukkan manfaat yang didapat oleh setiap *stakeholder*, dan angka negatif menunjukkan biaya/kerugian yang ditanggung oleh *stakeholders*. Sementara angka 0 (nol) menunjukkan

tidak ada biaya maupun manfaat (netral), atau kondisinya tidak berubah. Semakin besar angka berarti semakin besar manfaat yang diperoleh, dan semakin kecil angka berarti biaya yang ditanggung akan semakin besar, seperti terlihat pada tabel 3 di bawah.

Ringkasan dari analisis biaya dan manfaat dari masing-masing alternatif yang relevan dapat dilihat dalam tabel 4 di bawah.

A. ALTERNATIF PERTAMA : DO NOTHING

A.1. Manfaat:

Anggaran pemerintah tetap, artinya tidak ada alokasi dana tambahan untuk mengembangkan usaha kakao di Majene.

1. Bagi pemerintah, tidak ada penambahan alokasi anggaran, artinya pemerintah tidak melakukan penambahan atau pengurangan anggaran terkait pengembangan usaha kakao di Majene.

Tabel 3. Skor Indeks Manfaat dan Biaya

MANFAAT	NETRAL	BIAYA
3 = Manfaat Besar	0 = Netral/Tidak Ada Pengaruh/ Tidak Ada Perubahan	-3 = Biaya besar
2 = Manfaat Sedang		-2 = Biaya Sedang
1 = Manfaat Kecil		-1 = Biaya Kecil

Tabel 4. Ringkasan Manfaat dan Biaya

KELOMPOK/ STAKEHOLDER	MANFAAT ATAU BIAYA	ALTERNATIF TINDAKAN			
		I	II	III	IV
Pemerintah Daerah	1. Tambahan Anggaran (APBD)	0	3	0	0
	2. Kemudahan koordinasi antar SKPD	-1	1	1	2
	3. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program bantuan ke petani	-1	1	3	1
	4. Biaya pembentukan/revisi perda	0	-3	-3	0
	5. Resistensi antar SKPD	0	-3	0	0
	6. Biaya politik	0	-3	-1	0
	7. Biaya operasional (staf, sarana & prasarana, sosialisasi)	0	-3	-1	-1
	8. Kelompok target pembinaan dapat lebih terarah	-1	1	3	1
	9. Pengawasan pelaksanaan program-program	-1	0	3	0
	10. Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	0	2	2	1
	11. Tersedianya data organisasi dengan jelas	-1	0	3	0
Penyuluh	1. Fasilitas operasional penyuluh	0	3	0	2
	2. Optimalisasi pelaksanaan pendampingan	-1	3	3	3
	3. Efisiensi pelaksanaan pendampingan	-1	3	3	3
	4. Pengetahuan & keterampilan PPL	-1	3	0	3
	5. Ketersediaan/Kecukupan PPL tiap desa	-1	3	0	3
	6. Insentif sertifikasi	0	3	0	1
DPRD	Penyaluran Aspirasi Konstituen	0	1	2	0
Petani	1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani	-1	3	3	3
	2. Penguatan kapasitas petani	-1	2	3	3
	3. Keberlangsungan program pelatihan dan pendampingan kepada petani	-1	3	3	3
	4. Ter-advokasinya permasalahan petani	-1	2	3	2
	5. Tingkat kualitas dan kuantitas kakao	-1	2	2	2
	6. Akses terhadap permodalan/keuangan	-1	2	3	1
	7. Stabilitas dan standarisasi harga kakao	-1	2	3	0

Lanjutan Tabel 4.					
KELOMPOK/ STAKEHOLDER	MANFAAT ATAU BIAYA	ALTERNATIF TINDAKAN			
		I	II	III	IV
Petani	8. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan	-1	3	3	2
	9. Biaya modal produksi	0	-1	-1	-1
	10. Akses informasi harga dan informasi lainnya	-1	0	3	0
Pedagang pengumpul	1. Kemudahan mendapatkan biji kakao	-1	1	-1	1
	2. Kualitas dan kuantitas kakao	-1	2	2	2
	3. Standar harga kakao	1	-1	-2	-1
	4. Keuntungan/laba	1	1	-1	1
	5. Biaya operasional	-1	-1	-2	-1
Perusahaan	1. Kemudahan (akses informasi) & kepastian mendapatkan bahan baku	-1	3	3	1
	2. Kualitas dan kuantitas kakao	-1	2	2	2
	3. Informasi standar harga kakao	0	0	0	0
	4. Keuntungan/laba	-1	2	3	2
	5. Biaya operasional	-1	1	1	1
	6. Akses informasi lainnya	-1	0	3	0
TOTAL		-24	43	51	42

2. Bagi pedagang pengumpul dengan tidak adanya tindakan upaya pengembangan program dan pengaturan usaha kakao, dapat memperoleh margin keuntungan yang besar karena posisi tawar mereka dalam pembentukan harga (standar harga) kakao jauh lebih kuat dibandingkan petani.

A.2. Biaya:

1. Bagi Pemda, kerugian yang ditanggung dari alternative pertama adalah koordinasi antar SKPD masih sulit terbangun. Disamping itu, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program bantuan ke petani masih belum terjadi. Akibatnya, program tersebut tidak tepat sasaran.
2. Bagi petani, kapasitas petani menurun serta tidak teradvokasinya berbagai permasalahan yang dihadapi petani, yang berakibat pada menurunnya produktivitas kakao, kualitas kakao. Pada akhirnya, pendapatan dan kesejahteraan petani menurun.
3. Bagi penyuluh, pengetahuan dan kapasitas penyuluh tidak berkembang. Hal ini mengakibatkan sasaran program pemda tidak tepat dan pengetahuan petani pun tidak berkembang.
4. Bagi perusahaan, kemudahan dan ketersediaan bahan baku yang menggunakan bahan dasar kakao petani sebagai akibat dari produksi kakao petani yang menurun. Dengan demikian, terjadi inefisiensi dalam proses produksi sehingga mengakibatkan keuntungan/laba perusahaan juga menurun.
5. Ketersediaan pasokan kakao dari pedagang pengumpul juga menurun.

B. ALTERNATIF KEDUA: REVISI PERDA SOTK MAJENE UNTUK MEMISAHKAN KELEMBAGAAN YANG MENAUNGI PENYULUH PERTANIAN DARI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

B.1. Manfaat:

1. Adanya tambahan anggaran dari pemerintah pusat karena badan penyuluhan yang dibentuk sesuai dengan nomenklatur yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2006. Menurut pengalaman dari daerah lain, alokasi dana yang diberikan mencapai Rp 6,5 M pada tahun 2008. Selain itu, berbagai fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, alat peraga dll akan diberikan.
2. Penyuluh akan mendapatkan berbagai keuntungan karena terbentuknya lembaga ini. Diantaranya adalah insentif sertifikasi penyuluh, penyelenggaraan berbagai pelatihan bagi para penyuluh yang dapat meningkatkan kapasitas mereka, terjaminnya fasilitas sarana dan prasarana penyuluh, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan pendampingan kepada petani serta terpenuhinya standar satu penyuluh untuk satu desa.
3. Bagi petani, dengan meningkatnya penyuluhan, akan meningkatkan kapasitas petani dalam usaha kakao. Dengan meningkatnya kapasitas, petani lebih termotivasi untuk merawat kebunnya dengan baik serta meningkatkan akses petani terhadap modal. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kakao. Dengan demikian, pada akhirnya hal ini akan meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan petani.

4. Bagi pengusaha besar dan pedagang pengumpul, adanya peningkatan kapasitas SDM petani dan produktivitas kakao akan memberikan manfaat tersendiri yakni adanya kemudahan untuk mendapatkan biji kakao dan jaminan tersedianya pasokan bahan baku biji kakao dengan kualitas yang sesuai dengan yang dikehendaki perusahaan (sesuai standar kualitas yang diinginkan). Dengan demikian, keuntungan perusahaan maupun pengumpul semakin meningkat.

B.2. Biaya:

1. Biaya merevisi perda SOTK yang berasal dari anggaran Pemda dan DPRD
2. Kelembagaan baru yang dibentuk sedikitnya membutuhkan belanja operasional sebesar Rp 900 juta per tahun.
3. Biaya politik yang dikeluarkan untuk revisi perda SOTK, seperti lobi-lobi yang dilakukan untuk memebentuk lembaga baru
4. Resistensi antar SKPD akibat adanya pemisahan antara lembaga ketahanan pangan dan lembaga penyuluhan.
5. Perubahan anggaran dengan adanya pemisahan lembaga penyuluh dari badan yang ada saat ini.

C. ALTERNATIF KETIGA: MEMBENTUK PERDA TENTANG KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI SEBAGAI PELAKSANAAN DARI PERMENTAN NO.82/2013 DAN UU NO. 16 TAHUN 2006.

C.1. Manfaat:

1. Bagi Pemda, manfaat yang diterima adalah tersedianya database kelompok tani, adanya kejelasan dan ketertiban kelompok tani, efisiensi dan efektivitas program-program bantuan ke petani yang dilaksanakan oleh SKPD, ketepatan sasaran program bantuan usaha tani, kelompok target pembinaan dapat lebih terarah, dan kemudahan dalam pengawasan pelaksanaan program-program pengembangan usaha tani.
2. Bagi penyuluh, dengan adanya penguatan kelompok tani melalui perda, memberikan manfaat dalam optimalisasi pendampingan ke para petani, efisiensi pendampingan, serta kelompok target binaan menjadi lebih terarah.
3. Bagi petani, dengan adanya perda ini, dapat menjamin keberadaan kelompok tani yang berfungsi dengan baik. Dengan kelembagaan kelompok tani yang kuat, maka petani dapat menjadikan kelompok tani sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petani, karena fungsi kelompok tani adalah tempat belajar, tempat bekerjasama dan unit produksi. Selain itu, dengan kelompok tani yang kuat, maka petani memperoleh keuntungan seperti menguatnya posisi tawar petani, kemampuan memenuhi kuota produksi, dan pembinaan pemerintah yang lebih terarah dan tepat sasaran. Selain itu, kelembagaan petani yang kuat dapat memberikan kemudahan

dalam mengakses pasar dan permodalan.

4. Bagi pengusaha besar dan pedagang pengumpul, adanya peningkatan kapasitas SDM petani dan produktivitas kakao akan memberikan manfaat tersendiri yakni adanya kemudahan untuk mendapatkan biji kakao dan jaminan tersedianya pasokan bahan baku biji kakao dengan kualitas yang sesuai dengan yang dikehendaki perusahaan (sesuai standar kualitas yang diinginkan). Dengan demikian, keuntungan perusahaan maupun pengumpul semakin meningkat.

C.2. Biaya:

1. Biaya pembentukan perda kelembagaan petani yang berasal dari anggaran Pemda dan DPRD.
2. Biaya politik yang timbul dari pembentukan perda kelembagaan petani.
3. Pengepul sulit melakukan transaksi langsung dengan para petani. Hal ini menyebabkan biji kakao yang didapat berkurang. Akibatnya, pendapatan pengepul menurun.

D. ALTERNATIF KEEMPAT: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH MELALUI PELATIHAN

D.1. Manfaat:

1. Bagi Pemda, manfaat yang dirasakan adalah efisiensi pelaksanaan program bantuan ke petani dan meningkatnya koordinasi antara Dinas bidang Pertanian dengan Lembaga Penyuluhan.
2. Bagi penyuluh, program penguatan penyuluh melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan bagi para penyuluh yang dapat meningkatkan kapasitas mereka, terjaminnya fasilitas sarana dan prasarana penyuluh, efisiensi dalam pendampingan kepada petani dan terpenuhinya standar satu penyuluh untuk satu desa.
3. Bagi petani, dengan meningkatnya penyuluhan, akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam usaha kakao. Dengan adanya SDM petani yang baik, petani lebih termotivasi untuk merawat kebunnya dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kakao. Dengan demikian, pada akhirnya hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
4. Peningkatan produktivitas kakao petani memberikan kepastian pasokan kakao bagi perusahaan yang menggunakan bahan baku kakao. Efisiensi produksi juga akan tercipta sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.
5. Ketersediaan pasokan kakao dari pedagang pengumpul juga menurun sehingga keuntungan pedagang pengumpul berkurang.

D.2. Biaya:

1. Biaya operasional penyuluhan.
2. Biaya pelatihan bagi para penyuluh.
3. Biaya pendampingan yang dilakukan oleh Pemda.

PEMILIHAN ALTERNATIF TINDAKAN

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat yang telah dilakukan, **alternatif ketiga** yaitu: **MEMBENTUK PERDA TENTANG KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI SEBAGAI PELAKSANAAN DARI PERMENTAN NO.82 TAHUN 2013 DAN UU NO.16 TAHUN 2006** memiliki manfaat bersih lebih besar (46 poin) dibandingkan alternatif lainnya. Pihak yang mendapat kerugian dari alternatif ini adalah pedagang pengumpul/tengkulak. Sementara stakeholder lain lebih besar menerima manfaat daripada biaya yang ditanggung, khususnya petani sebagai aktor kunci dari permasalahan yang dihadapi usaha kakao di Majene. Namun demikian, bila dilihat dari eksternalitas positif yang dihasilkan dapat ditunjukkan pada Gambar 2 dibawah:

Dari segi biaya, alternatif ini hanya akan menimbulkan biaya baik secara nominal maupun biaya politik yang timbul dari penyusunan perda tersebut. Sementara stakeholder selain Pemda yang menanggung biaya yang muncul dari alternatif ini adalah para pedagang pengepul. Mereka mengalami kerugian yang harus ditanggung sebagai akibat dari kuatnya kelembagaan petani.

VI. KONSULTASI PUBLIK

Konsultasi publik merupakan langkah yang sangat penting dalam proses review suatu regulasi atau membuat suatu regulasi baru. Langkah ini dilakukan dengan kesadaran bahwa pemerintah tidak

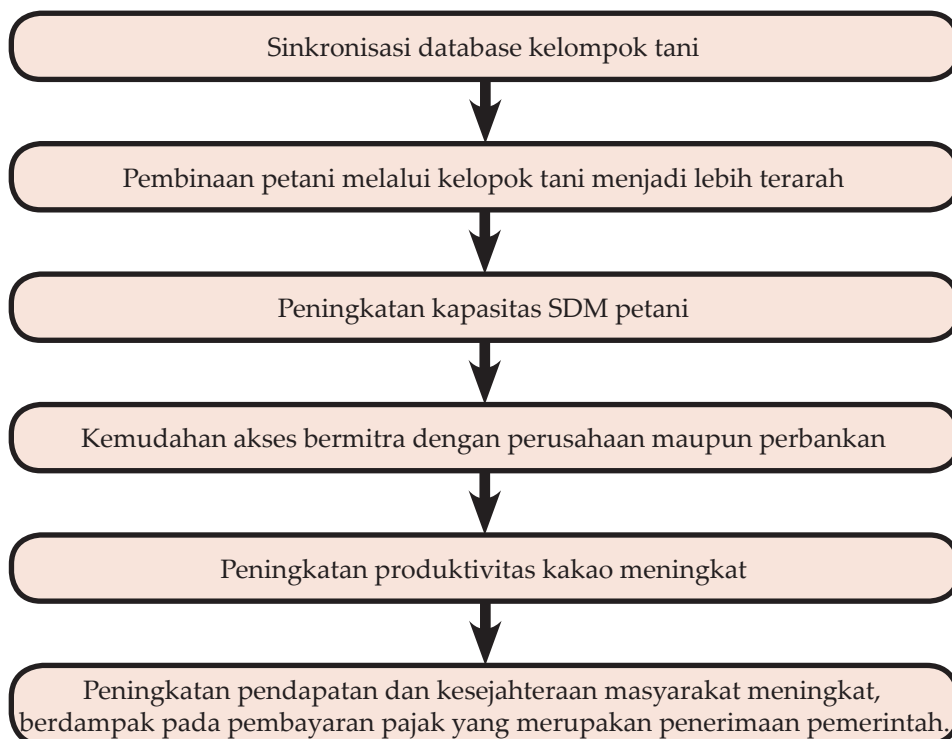
mempunyai informasi yang sempurna mengenai pihak yang akan diregulasi dan pengaruh regulasi, bagaimana persepsi mereka terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan, apa yang mereka kehendaki, dan apa kemungkinan yang akan terjadi seandainya regulasi diberlakukan. Tabel 5 di samping mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pembentukan perda kelompok tani.

Dalam penyelenggaraan konsultasi publik untuk membentuk perda kelompok tani, pihak yang menyelenggarakan adalah Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang dibantu oleh SKPD terkait. Agar konsultasi publik dilaksanakan dengan efektif, konsultasi ini sedikitnya dilakukan tujuh kali, yakni dalam tahapan kebijakan pembuatan RIA, penyusunan RIA Statemen (RIAS), pembahasan pra ranperda dan ranperda. Pembahasan ranperda perlu dilakukan konsultasi sedikitnya empat kali. Hasil konsultasi publik ini digunakan sebagai bahan penyempurnaan naskah kebijakan untuk merevisi maupun membuat perda, baik memperkuat permasalahan maupun merubah permasalahan yang sedang dibahas.

VII. STRATEGI IMPLEMENTASI

Regulasi yang baik menjadi tidak berguna jika tidak dapat dilaksanakan (diimplementasikan). Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi implementasi guna memaksimalkan tingkat kepatuhan atas perda yang akan dibentuk atau direvisi. Strategi implementasi yang dapat dilakukan selanjutnya

Gambar 2. Externalitas Positif Perda Kelompok Tani



adalah sebagai berikut:

- **Sosialisasi**

Sosialisasi dalam bentuk konsultasi publik mengenai pembentukan perda ini perlu dilaksanakan sedikitnya tujuh kali yakni dalam tahapan kebijakan pembuatan RIA, penyusunan RIA Statemen (RIAS), pembahasan pra ranperda dan ranperda.. Konsultasi publik tersebut diharapkan efektif dalam menggali permasalahan yang terjadi serta mencari solusi

yang disepakati bersama. Hal ini sangat penting dalam menampung aspirasi dari masyarakat agar tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan perda tersebut tinggi.

- **Pelaksanaan/monitoring**

Monitoring menjadi salah satu unsur penting dalam mengimplementasikan sebuah peraturan. Dengan adanya monitoring yang sangat baik, maka jaminan akan pelaksanaan regulasi dapat terjadi.

Tabel 5. Identifikasi Stakeholder yang Terlibat dalam Pembentukan Perda Kelompok Tani

KONSULTASI PUBLIK	
Check List Question	Perda Kelompok Tani
1. Identifikasi pihak mana sajakah yang relevan untuk dilakukan konsultasi?	1. Petani 2. KTNA 3. Penyuluh 4. KPPK 5. Perbankan 6. SKPD Teknis terkait pertanian 7. DPRD (Komisi II) 8. Pedagang Pengusaha 9. BSP WASIAT 10. Bagian Hukum 11. Satpol PP 12. Diskoperindag
a) Pihak mana saja yang memiliki pengaruh lebih besar atas regulasi yang disusun?	1. SKPD Teknis terkait pertanian 2. Komisi II DPRD
b) Pihak mana saja yang memiliki pengetahuan yang luas atas permasalahan yang sedang dibahas?	1. Staff Ahli Bupati Bidang Pertanian 2. KTNA 3. Perguruan Tinggi/Akademisi 4. Pegiat/LSM
2. Identifikasi pihak mana sajakah yang mendukung dan pihak yang kurang mendukung? Apa alasannya?	<p>Pihak yang Mendukung:</p> 1. Petani 2. KTNA 3. Penyuluh 4. KPPK 5. Perbankan 6. SKPD Teknis terkait pertanian 7. DPRD (Komisi II) 8. BSP WASIAT 9. Bagian Hukum 10. Satpol PP 11. Diskoperindag 12. Bappeda <p>Pihak yang Menghambat: Pedagang Pengepul Alasan: Kehilangan pendapatan</p>
3. Bagaimana mekanisme yang tepat dalam menyelenggarakan konsultasi publik	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi draft regulasi dengan permohonan untuk memberikan draft tersebut • Pertemuan/konsultasi dengan pengamat ahli, pihak yang akan terkena dampak regulasi, dan masyarakat umum. Pertemuan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pertemuan kecil (informal atau formal), pertemuan besar (seminar atau symposium).
4. Bagaimana penggunaan atas hasil konsultasi publik	
a) Apakah ada publikasi atas hasil konsultasi publik	Publikasi atas hasil konsultasi publik dibuat dalam bentuk "RIA Statemen" baik berupa hardcopy maupun dipublikasikan melalui media cetak, disebarakan dalam diskusi publik secara langsung maupun di media elektronik.
b) Apakah hasil konsultasi publik dapat merubah isi regulasi atau permasalahan yang sedang dibahas	Dokumen ini sebagai dokumen yang fleksibel yang selalu dapat diubah seiring dengan perkembangan informasi yang diperoleh dari partisipan/stakeholder terkait.

• **Mekanisme insentif dan sanksi**

Agar kebijakan yang telah dipilih dapat diimplementasikan dengan baik, perlu adanya mekanisme insentif dan disinsentif. Mekanisme insentif yang dapat diberikan agar masyarakat patuh terhadap perda kelembagaan petani adalah pemberian berbagai fasilitas bagi poktan yang

terregistrasi, seperti kemudahan akses kredit perbankan, pelatihan serta kemudahan akses ke perusahaan. Sementara mekanisme disinsentif yang diberikan dapat berupa sanksi administratif, dan jika diperlukan bisa diberikan sanksi pidana. ■

Tabel 6. Ringkasan Strategi Implementasi

STRATEGI IMPLEMENTASI	
1. Apakah mekanisme yang digunakan untuk alternatif tindakan terpilih?	
a) Regulasi atau non regulasi?	Regulasi dalam bentuk peraturan daerah (perda)
b) Bagaimana analisis persepsi tingkat kepatuhan?	<ul style="list-style-type: none"> • Para pihak (stakeholders) diyakini patuh terhadap kebijakan yang dibuat, karena kebijakan ini berasal dari aspirasi stakeholder dari bawah (Bottom Up). • Adanya kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para petani kakao di Majene.
c) Bagaimana analisis biaya manfaat?	Berdasarkan analisis biaya dan manfaat, kebijakan ini dapat disimpulkan lebih besar manfaat daripada biaya.
2. Apakah jenis sanksi yang digunakan untuk mendorong kepatuhan?	Untuk mendorong tingkat kepatuhan terhadap aturan, sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administratif. Bahkan, jika diperlukan, sanksi pidana juga bisa dikenakan bagi para pelanggar.
3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan untuk mendorong kepatuhan?	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Publik (FGD atau pertemuan informal) kepada para pihak terkait. • Pemaparan hasil/hearing/audiensi dengan Bupati atau DPRD. • Publikasi dilakukan melalui media cetak maupun elektronik.
a) Bagaimana efektifitas sosialisasi yang dilakukan?	Efektif
b) Bagaimana intensitas sosialisasi yang dilakukan?	7 kali





FORDFOUNDATION

*Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch*

Gd. Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Phone: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643